

BAB III

GERAKAN SEPARATISME SUKU KURDI DI TURKI

Pengantar

Bab ini akan membahas tentang mengenai gerakan separatisme suku Kurdi, kembalinya eskalasi antara PKK suku Kurdi di Turki, dan kebijakan yang diambil pemerintah Turki dalam menghadapi PKK suku Kurdi dilihat kebijakan politik dalam dan luar negeri, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial budaya. Intinya bab ini menjelaskan tentang awal mula terciptanya separatisme, dan langkah yang diambil pemerintah Turki dalam merespons gerakan separatisme suku Kurdi.

A. Gerakan Separatisme Suku Kurdi

Sejarah Suku Kurdi berasal dari bangsa Indo-Eropa yang dikenal sebagai suku yang mendiami daerah pegunungan Turki, Irak, Iran, dan Suriah sejak 8000 tahun yang lalu. Menurut Profesor Mehrdad R Izady, seorang pakar Kurdi di Universitas Harvard, sejarah suku Kurdi dibagi menjadi empat periode. Periode pertama (6000 SM sampai 5400 SM) yang sering disebut dengan periode Halaf. Hal ini berdasarkan bukti-bukti arkeologi, seperti bentuk dan lukisan pada pot-pot kuno yang ditemukan di gunung Tell Halaf yang terletak di sebelah barat Qamishli (Suriah).²¹ Periode kedua (5300 SM – 4300 SM) disebut periode al-Ubaid, nama sebuah gunung di utara Irak Utara tempat ditemukannya banyak peninggalan kuno. Penduduk Ubaid inilah yang kemudian memberikan nama “Tigris” dan “Euphrates” untuk dua sungai utama di Irak yang mengalir dari Kurdistan ke Mesopotamia dan meneruskan suku Chaldean atau Khaldi. Periode ketiga disebut zaman Hurri,

²¹ (<http://swaramuslim.com/islam/more>)

dengan pusat kehidupan pindah kekawasan pegunungan Zogros-Taurus-Pontun dengan beberapa kerajaan kecil, antara lain Arrap'ha, Melidi, Washukani dan Aratta. Sekitar 2000 SM suku Hitti dan Mittani (Sindi) datang dan menetap di Kurdistan. Periode keempat disebut periode Simitik dan Turkik, menyusul interaksi orang-orang Medes dengan orang-orang Yahudi, Nasrani dan Islam (Arab) serta asimilasi orang mereka dengan bangsa Turki. Terbukti dengan adanya nama-nama kabilah seperti Karachul, Oghaz, Devalu, Karaqich, Iva dan sebagainya.

Konflik yang terjadi antara suku Kurdi dengan Pemerintah Turki disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang menyangkut masalah politik, ekonomi dan budaya. Secara politik, suku Kurdi menuntut pemberian status otonomi di wilayah Kurdistan di Turki bagian tenggara kepada Pemerintah Turki, tetapi tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah Turki dengan alasan menjaga keutuhan bangsa. Secara ekonomi, wilayah kurdi di Turki bagian tenggara yang merupakan penghasil minyak dan gas terbesar yang berada diantara perbatasan Irak Mosul dan Kirkuk. Serta dikhawatirkan keinginan suku Kurdi yang ingin mendirikan sebuah Negara otonom Kurdistan mengganggu stabilitas pemerintahan Turki. Dalam bidang budaya suku kurdi dilarang menggunakan bahasa kurdi, dan dilarang menggunakan identitas yang menunjukkan kesukuannya, dengan sebab tersebut diatas maka timbullah rasa kekecewaan yang dalam terhadap pemerintah Turki.

Setelah hampir enam dasawarsa tunduk pada pemerintahan Turki, mulai pertengahan dekade 70-an perjuangan etnis Kurdi untuk memerdekakan diri mulai kembali subur, yang salah satunya dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa yang membentuk *Partiya Karkaran Kurdistan* (PKK) atau Partai Pekerja Kurdi dibawah kepemimpinan Abdullah Ocalan pada tahun 1978. Berdirinya PKK ini merupakan

salah satu momentum perjuangan etnis Kurdi, yang sejak pendiriannya terus tumbuh bahkan menjadi simbol bagi etnis Kurdi dalam memperjuangkan hak kemerdekaannya. Bagi pemerintah Turki sendiri, terutama kalangan militer, kehadiran PKK dianggap menciptakan ketidakstabilan, memperlemah kondisi ekonomi, politik dan integritas wilayah Turki. PKK dianggap sebagai pencipta teror dengan aksi-aksi terorismenya. Pihak militer kerap kali menghubungkan aksi terorisme, penculikan, perusakan dan kerusuhan dengan gerakan pembebasan Kurdi, sehingga militer mempunyai legitimasi untuk menghantam/menghancurkan basis-basis pergerakan Kurdi.

Tertangkapnya Abdullah Ocalan pada hari Senin (15 Februari 1999) di Nairobi, Kenya oleh satuan pasukan khusus Turki telah menimbulkan reaksi sebagian besar masyarakat imigran Kurdi di Eropa Barat, Inggris dan bahkan sampai Kanada dan Australia. Di Jerman digelar demonstrasi besar-besaran untuk menentang penangkapan terhadap Ocalan. Penangkapan ini mendapat liputan luas dari media massa di banyak negara sehingga dijadikan momentum bagi etnis Kurdi untuk menyebarluaskan perjuangan mereka selama ini.

Keterlibatan Suriah dalam konflik Kurdi antara lain nampak dalam sengketa wilayah Anatolia (tempat sebagian besar etnis Kurdi menetap), yang diklaim oleh keduanya sebagai bagian dari negaranya. Konflik yang sempat memanas yang ditandai dengan pengerahan pasukan di perbatasan kedua negara pada pertengahan tahun 2002 semakin mempersulit posisi Turki dalam menyelesaikan masalah Kurdi. Suriah dituduh oleh Pemerintah Ankara mensuplai dan melindungi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh PKK. Penyebaran etnis Kurdi yang meliputi empat negara dapat diartikan bahwa masalah Kurdi bukan hanya merupakan masalah domestik satu negara saja (dalam hal ini Turki). Kehadiran penduduk Kurdi dalam

jumlah cukup besar di Turki, Irak, Suriah dan Iran mengandung arti bahwa sejak era pembentukan negara modern di kawasan Timur Tengah, etnis Kurdi telah menjadi faktor dan secara berkala menjadi faktor penentu dalam hubungan antar negara di kawasan itu. Bagi Turki masalah Kurdi berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini terlihat pada saat negara-negara tetangga Turki menggunakan isu Kurdi untuk melemahkan posisinya. Masalah Kurdi sendiri bagi Turki dan negara tetangganya terutama Irak dan Iran telah menimbulkan kepentingan yang hampir sama dalam mengatasi masalah Kurdi ini.

Pemerintah Ankara juga harus memperhatikan kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara tetangganya untuk mengatasi masalah penyebaran penduduk Kurdi, perbaikan kondisi yang didapatkan etnis Kurdi di Irak yang merupakan kelanjutan dari Revolusi 1958 telah membantu memberikan etnis Kurdi dorongan bagi terciptanya momentum baru di Turki. Lebih penting lagi, kebijakan Pemerintah Baghdad terhadap penduduk Kurdi sejak 1974 itu telah dimanfaatkan oleh pihak oposisi Turki dari kalangan Kurdi untuk menuntut hak sama dengan yang diterima oleh kalangan Kurdi di Irak. Sejak tahun 1991, kaum Kurdi Irak telah menikmati hak politik dan budaya secara luas. Hak tersebut tidak dapat diperoleh oleh kalangan Kurdi Turki termasuk pernyataan-pernyataan resmi dari penerapan otonomi akan hak-hak atas politik, bahasa dan hak budaya. Kondisi etnis Kurdi secara umum menampilkan gejala yang hampir sama, yakni : pertama, wilayah Kurdi tumpang tindih dengan perbatasan negara-bangsa sehingga mereka dianggap sebagai hambatan bagi keamanan nasional serta sangat rentan untuk dimanfaatkan ataupun dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan regional maupun internasional. Kedua, wilayah Kurdi di negara-negara tersebut biasanya berada dalam keadaan miskin, wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi minim, serta secara sistematis

terpinggirkan dari pusat-pusat ekonomi. Ketiga, sebagai akibat dari dinamika dari proses asimilasi, tekanan dan daya tahan etnis Kurdi di setiap negara sangat dipengaruhi oleh arah dan hasil dari perjuangan etnis Kurdi di negara-negara tetangga lainnya. Keempat, masyarakat Kurdi sendiri merupakan masyarakat yang kompleks dengan beragam kebijakan, ideologi, kelas sosial dan dialek serta memiliki banyak klan. Sehingga konflik terhadap Kurdi sangat sulit didefinisikan dari satu bidang dan aspek saja.

Perjanjian Sevres (Treaty of Sevres) tahun 1920 di Perancis oleh pihak Sekutu sebagai pihak yang menang dalam Perang Dunia I dengan Dinasti Ustmaniah Turki memberikan keuntungan bagi perjuangan Suku Kurdi. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan pembentukan wilayah Kurdistan merdeka yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Dinasti Ustmaniah Turki, tetapi kenyataannya keputusan tersebut tidak terealisasi. Turki tidak mau menjalankan ketentuan mengenai Suku Kurdi, bahkan Mustafa Kemal Attaturk memaksa sekutu untuk membatalkan Perjanjian Sevres yang merugikan dan melemahkan Turki karena perbatasan timur Negara Turki memanjang hingga Sulaymaniah, Arbil, Kirkuk, dan Mosul berada di utara wilayah Irak sekarang. Dilihat sejarahnya, sebenarnya kemerdekaan Kurdi pernah dijanjikan oleh Presiden AS Woodrow Wilson (1856-1924) melalui perjanjian Sevres (the Treaty of Sevres) tahun 1920 antara Kekhalifahan Turki Usmani dan sekutu AS untuk membagi-bagi wilayah bekas kekuasaan Turki Usmani. Hanya saja terbentuknya negara baru Turki di bawah pimpinan Kemal Ataturk yang meliputi sebagian besar wilayah Kurdistan telah memupus harapan itu. Sejak itu konflik antara suku Kurdi dan Turki terus berkembang. Paska kemerdekaan Irak tahun 1932 bangsa Kurdi semakin terisolasi dan terpecah-pecah. Mereka yang mendiami daerah-daerah perbatasan ini selalu menjadi korban pertikaian antara

Irak, Iran dan Turki. Karena frustrasi akan semakin tertutupnya peluang menuju kemerdekaan, muncullah kelompok-kelompok militan Kurdi yang kerap kali melancarkan aksi-aksi terorisme.²²

Pemberontakan etnis Kurdi pertama kali muncul pada Februari 1925 dipimpin oleh Syekh Said, namun pemberontakan ini tidak bertahan lama karena rezim Mustafa Kemal Attaturk pada saat itu cukup sigap dengan segera mengerahkan angkatan bersenjata untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pada tahun 1929 pemberontakan kembali terjadi namun dengan tingkat kekerasan yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya sehingga dengan mudah dapat segera ditangani oleh pemerintah Turki. Pasca pemberontakan kedua ini, sejumlah pimpinan Kurdi yang tertangkap diasingkan ke daerah-daerah pedalaman di wilayah timur. Pengawasan secara ketat segera dilakukan atas daerah tersebut dan kawasan tersebut kemudian dinyatakan tertutup bagi pengunjung asing. Isolasi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kembali pemberontakan etnis Kurdi yang mengancam proyek modernisasi dan sekularisasi Attaturk atas Turki.

Hubungan antara rakyat Kurdi dan pemerintah Republik yang didominasi oleh orang Turki memburuk pada tahun 1924. Penghapusan kekhalifahan menghapuskan simbol religious penting yang menyatukan dua komunitas tersebut. Pada waktu yang sama, republik nasionalis, dalam usahanya merekonstruksi kesadaran nasional yang baru mengembangkan kebijakan represif terhadap identitas kurdi tersebut, kebijakan tersebut antara lain adalah pemakaian dan pengajaran bahasa Kurdi secara umum dilarang, para pemilik tanah dan para kepala suku Kurdi yang berpengaruh dipaksa bermukim di bagian barat negara tersebut. Tanda pertama

²²Rahman, Mustafa Abd, *Geliat Irak Menuju Era Pasca Saddam*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Oktober 2003. hal 196

perlawanan dari suku Kurdi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebuah pemberontakan abortif yang dilancarkan oleh garnisium di Beytussebab di sebelah tenggara pada bulan Agustus 1924. Pemberontakan besar juga dirancang oleh Azadi dan Sheikh Said untuk dilancarkan bulan Mei 1925.²³ Peristiwa ini ternyata meletus lebih cepat dari perkiraan dan para pemberontak Kurdi kini secara cepat dapat didesak kembali ke pegunungan. Penangkapan Sheikh Said pada tanggal 27 April betul-betul menandai berakhirnya pemberontakan tersebut. Sekalipun kelompok-kelompok kecil gerilyawan masih melanjutkan perang gerilya disepanjang musim panas.

Pada awal periode Republik Turki tahun 1926, di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk, penggunaan bahasa Kurdi dilarang di depan publik. Pemerintah Turki melarang penyampaian pendidikan dan penyebaran informasi baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik dalam bahasa Kurdi. Tujuan pelarangan bahasa Kurdi ini adalah untuk menasionalisasikan suku Kurdi menjadi warga Negara atau bangsa Turki tanpa ada unsur-unsur etnis yang melekat pada setiap suku di Turki. Pelarangan memakai bahasa Kurdi ini sejak dideklarasikannya Republik Turki pada tahun 1924 istilah kewarganegaran harus disesuaikan dengan istilah ke-Turki-an, etnis Kurdi dan etnis lainnya yang dapat dikatakan sebagai warga Negara Turki apabila mereka meninggalkan identitas keetnisannya. Penekanan dan pengekanan terhadap identitas Kurdi inilah yang mengakibatkan munculnya konflik antara pemerintah dan etnis Kurdi.²⁴

Kemudian Tahun 1984, PKK mengubah dirinya menjadi sebuah organisasi paramiliter, yang berbasis di wilayah Iran, Irak, dan Syria. Pada tahun yang sama,

²³ Zurcher, Erik J. (2003). *Sejarah Modern Turki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

²⁴ Ullly Nuzulian. (2009). "Sejarah Panjang Perjuangan Etnis Kurdi Di Turki". *Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura, Edisi ekonomi dan sosial. Volume XV. No. 3 Juli 2009.*

serangan konvensional pertama segera dilancarkan terhadap target-target milik pemerintah di Provinsi Anatolia, wilayah tenggara Turki. Jika sebelumnya serangan-serangan terhadap kepentingan pemerintah pusat dilakukan secara sporadik dan tak terorganisir dengan baik, maka pada periode ini perlawanan bersenjata PKK.²⁵

Pada tahun 1989, PKK membentuk aliansi dengan sejumlah kelompok gerilya sayap kiri yang ekstrim di kota, seperti Dev Sol, TIKKO, THKP-C dan lain-lain dengan tujuan meningkatkan kemampuan untuk bergerak di kota-kota besar Turki. PKK juga bisa menarik dukungan masyarakat lokal yang secara konsisten turut bergerilya dengan PKK (hlm. 415).Aktivitas para gerilyawan PKK ini mengakibatkan angkatan bersenjata Turki dihadapkan pada situasi perang gerilyawan klasik.PKK juga mendapat dukungan dari sebagian besar penduduk lokal yang ikut bergerilya.Kemarahan angkatan bersenjata Turki kemudian diarahkan kepada warga sipil local.²⁶

Bentrokan antara pasukan keamanan Turki dengan PKK telah memakan Korban yang tidak sedikit. Hingga tahun 1991 diperkirakan terdapat sekitar 3.568 korban jiwa, yang terdiri dari 1.278 warga sipil, 1444 militan PKK dan 846 pasukan keamanan Turki. Selain mempergunakan serangan-serangan yang bersifat konvensional, dalam kurun waktu 1996-1999 PKK menggunakan metode serangan bom bunuh diri (suicide bombing).²⁷ Konflik antara Kurdi dengan angkatan bersenjata Turki, dalam kurun waktu antara 1984 hingga 1996 korban tewas sudah mencapai 17.000 orang. Upaya pemerintah Turki dalam memutuskan pasokan dan rute infiltrasi PKK, pertempuran dilaksanakan secara regular hingga ke perbatasan

²⁵(<http://www.globalsecurity.org>)

²⁶Zurcher, Erik J. (2003). *Sejarah Modern Turki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

²⁷Rubbin, Barry & Kemal Kirisci. (Ed). (2002). *Turkey in World Politics An EmergingMultiregional Power*. Istanbul: Bogazici University Press

Irak. Pesawat-pesawat Turki membombardir kamp-kamp PKK di Irak Utara.²⁸ Kelompok gerilyawan Kurdi tercatat beberapa kali melakukan serangan bom di kota-kota wisata Aegean. Diantaranya, serangan bom di resor Cesme pada 11 Juli, di Pantai Aegean, yang melukai sedikitnya 20 orang, sedangkan tanggal 30 April sebuah bom juga meledak di sebuah alat pemutar kaset, menewaskan seorang polisi dan empat warga di Kusadasi. Gerilyawan separatis Kurdi telah mengancam akan terus melakukan serangan di sector pariwisata Turki, yang sangat vital bagi perekonomian Turki.²⁹

Pada tahun 1990-an Damaskus pernah mendukung PKK dan menjamin ruang perlindungan bagi PKK di kawasan Suriah. Penyebabnya, pada waktu itu Turki menjalin hubungan baik dengan Israel. Pada masa-masa Perang Dingin, Israel dan Turki dipandang sebagai pro Barat, sementara Suriah cenderung berorientasi kepada kepentingan Uni Soviet. Bahkan Rusia maupun Iran bersimpati besar pada Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang sempat melakukan pemberontakan di Turki Tenggara melalui PKK, keduanya dapat menyerang Turki dan menjatuhkan posisi Turki dalam Uni-Eropa

B. Struktur organisasi dan tujuan PKK

1. Profil dan struktur organisasi PKK:

Kurdistan Workers' Party (PKK)

Nama asli: Partiya Karkeran Kurdistan (PKK)

Alias: KADEK, KHK, Kongra-Gel (KGK), Kurdistan Kongreya Azadi atau Demokrasiya, Kurdistan Freedom and Democracy Congress, Kurdistan People's Conference, The People's Congress of Kurdistan

²⁸Zurcher, Erik J. (2003). *Sejarah Modern Turki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

²⁹(Kompas, 17 Juli 2005)

BasisOperasi: Turki

Tanggal Dibentuk: 1974

Kekuatan: Lebih dari 1.000 anggota

Klasifikasi: Komunis / Sosialis, Nasionalis / Separatis

Sumber keuangan: sumber pendanaan terbesar PKK adalah penyelundupan narkoba dan pemerasan. Kelompok Juga Menerima pendanaan melalui amal, perusahaan komersial, dan Remitansi dari Eropa. Suriah, Iran, dan Irak telah memberikan beberapa bantuan kepada PKK.

Tujuan pendirian:

PKK selalu berkomitmen untuk penciptaan rumah independen untuk Kurdi . Tujuan awal mereka , pada tahun 1970 , adalah untuk mencapai ini melalui revolusi Marxis di Turki. Mereka kemudian ditinggalkan taktik ini untuk mengupayakan terbentuknya sebuah negara Kurdi merdeka. Telah diusulkan bahwa bagian dari alasan untuk meninggalkan sikap Marxis sekuler sehingga kelompok yang lebih baik bisa mendukung pengadilan kalangan terutama Muslim Sunni Kurdi Turki .

Serangan Terkemuka :

Sebuah sayap bersenjata PKK dilaporkan mengambil tanggung jawab untuk September 2006 ledakan ranjau darat di Igdir, Turki yang melukai 17 orang. Ranjau darat adalah taktik PKK karakteristik, meskipun kelompok itu berkomitmen untuk pelarangan ranjau darat pada bulan Juli 2006 .

PKK diduga berangkat tiga bom yang melukai 21 warga Turki dan wisatawan Inggris pada 28 Agustus 2006.

Dimulai pada tahun 1984 dan terus berlanjut sampai akhir dekade , PKK meluncurkan sejumlah serangan mematikan terhadap desa-desa Kurdi di Turki tenggara , menewaskan korucu] (pelindung desa) dipersenjatai oleh pemerintah Turki dan kolaborator dipertimbangkan. Dalam serangan 1987 di Pinarcik , 31 korucu tewas .

Filosofi: Partai Pekerja Kurdistan (PKK) adalah sebuah organisasi sayap kiri nasionalis Kurdi. PKK didirikan pada tahun 1974 oleh sekelompok mahasiswa Turki keturunan etnis Kurdi yang aktif di kalangan komunis Dalam Turki. Kelompok yang dipimpin oleh Abdullah Ocalan, informal dioperasikan sampai tahun 1978, ketika diformalkan jadwal. Sangat dipengaruhi oleh doktrin Maois, tujuan PKK adalah untuk menghasut sebuah revolusi itu akan membebaskan orang-orang Kurdi dan Membentuk negara Kurdi merdeka. Ketika didirikan, kelompok itu keras Menentang ke pemerintah Turki, percaya Bisa Bahwa negara Kurdi dibentuk hanya jika pemerintah Turki menindas dan kolonialis dikalahkan.

Pemimpin Kunci

1. Bayik, Cemil
2. Kalkan, Duran
3. Ocalan, Abdullah
4. Ocalan, Osman
5. Pir, Kemal
6. Taz,Nizamettin
7. Yildirim, Kesire³⁰

³⁰www.pkkonline.com

2.Latar belakang dan sejarah singkat PKK

Partai Pekerja Kurdistan (PKK) mulai tahun 1974 sebagai organisasi Marxis-Leninis di bawah pimpinan Abdullah Ocalan. Seperti kelompok lain yang didirikan pada tahun 1970, dan sebagai nama (partai pekerja) menunjukkan, PKK pertama kali dilihat pembebasan nasional melalui lensa sosialis. Dalam visi awal, sebuah revolusi grosir akan membawa masyarakat yang lebih setara di mana semua warga negara akan diakui. Meskipun sejauh mana PKK benar-benar meninggalkan mereka di belakang sentimen komunis telah dipertanyakan, fokus mereka pada 1980-an telah dipersempit ke pembebasan nasional dan pembentukan independen, Kurdistan demokratis.

PKK telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pada bulan September 2006, Irak menambahkan namanya ke dalam daftar, dan menunjuk koordinator khusus untuk memerangi PKK, yang menjadi sangat aktif dalam Kurdi Irak utara menyusul penggulingan rezim Hussein. Pada tahun 1978 organisasi disesuaikan nama "Partai Pekerja Kurdistan" dan mengobarkan Perang Perkotaan antara 1978 dan 1980. Organisasi direstrukturisasi sendiri dan memindahkan struktur organisasi ke Suriah antara tahun 1980 dan 1984 hanya setelah kudeta Turki pada Tahun 1980.³¹

Kampanye kekerasan bersenjata dimulai pada tahun 1984 berbasis pedesaan pemberontakan berlangsung antara 1984 dan 1992. PKK bergeser kegiatannya untuk memasukkan perang kota antara 1993 dan 1995 dan 1996 sampai 1999. Pemimpin partai itu ditangkap di Kenya pada awal tahun 1999, menyusul kampanye internasional oleh AS, Israel, Yunani, Inggris dan Italia. Setelah inisiatif perdamaian secara sepihak menyatakan pada tahun 1999, PKK terpaksa

melanjutkan konflik akibat ofensif militer Turki pada tahun 2004. Sejak 1974, sudah mampu berkembang, beradaptasi, mengalami metamorfosis, yang menjadi utama faktor dalam kelangsungan hidupnya.

Pada awal 1970-an , kelompok inti organisasi itu sebagian besar terdiri dari siswa yang dipimpin oleh Abdullah Ocalan (" Apo ") di Ankara . Kelompok ini segera pindah fokusnya oleh besarnya populasi Kurdi di Turki tenggara . Pertemuan pada tanggal 25 November 1978, di sebuah rumah teh dekat Diyarbakir dianggap pertemuan pendiri . [17] Pada tanggal 27 November 1978, kelompok mengadopsi nama Partai Pekerja Kurdistan . Menyertai kiri , ideologi Marxis radikal , kelompok ambil bagian dalam konflik kekerasan dengan entitas sayap kanan sebagai bagian dari kekacauan politik di Turki pada saat itu. Pada tahun 1979 , sebagai tindakan " propaganda akta , " kelompok mencoba untuk membunuh pemimpin suku Kurdi Mehmet Celal Bucak . Mereka mengklaim bahwa ia mengeksploitasi petani , dan bekerja sama dengan Turki . Ini menandai periode perang perkotaan ketat di antara unsur-unsur politik yang radikal lainnya.

Tahun 1980 Turki kudeta mendorong organisasi untuk tahap lain , dengan anggota (seperti Sakine Cansız , salah satu co - pendiri [17]) melakukan penjara, yang diancam dengan pidana mati , atau melarikan diri ke Suriah. Pada tanggal 10 November 1980, PKK membom Konsulat Turki di Strasbourg, Prancis dalam operasi bersama dengan Armenia Kelompok radikal asala, yang mereka mengklaim sebagai awal dari "kolaborasi berbuah".

Mulai tahun 1984 , PKK berubah menjadi sebuah kelompok paramiliter, menggunakan kamp pelatihan yang terletak di Perancis . Ini melancarkan serangan dan pemboman terhadap instalasi pemerintah, militer, dan berbagai "lembaga negara" - beberapa di antaranya terhubung ke Proyek Anatolia Tenggara. PKK

menjadi kurang terpusat, mengambil operasi di berbagai negara Eropa dan Timur Tengah, khususnya Jerman dan Perancis. PKK telah menyerang sasaran sipil dan militer di berbagai negara, seperti Turki, Perancis, Belgia dan Irak.

Dimulai dengan pertengahan 1990-an, organisasi kehilangan tangan atas dalam operasinya sebagai konsekuensi dari perubahan taktik oleh Turki dan Suriah ditinggalkan stabil dukungan untuk grup. Pada pertengahan 1990-an, juga mulai serangkaian pemboman bunuh diri 15, 11 di antaranya dilakukan oleh perempuan. Pada akhir 1990-an, Turki meningkatkan tekanan dan perang rahasia antara Turki dan Suriah mengakhiri dukungan Suriah terbuka. [22] Pada tahun 1999, Ocalan ditangkap, diadili dan dihukum mati, tapi ini kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup sebagai bagian dari mencari keanggotaan Uni Eropa pemerintah. [23]

Dengan keprihatinan keamanan berkurang, parlemen Turki memulai proses dikendalikan pembongkaran kontrol hukum, menggunakan istilah "normalisasi" atau "pemulihan hubungan," tergantung pada sisi masalah ini. Ini sebagian santai larangan penyiaran dan penerbitan dalam bahasa Kurdi - meskipun hambatan yang signifikan tetap [24] Pada saat yang sama, PKK dalam daftar hitam di banyak negara. Pada tanggal 2 April 2004, Dewan Uni Eropa menambahkan PKK ke dalam daftar organisasi teroris. Belakangan tahun itu, Departemen Keuangan AS bergerak untuk membekukan aset cabang organisasi. PKK pergi melalui serangkaian perubahan, dan pada tahun 2003 itu mengakhiri gencatan senjata sepihak menyatakan saat Ocalan ditangkap.

Selama awal 1990-an, PKK melanjutkan strategi untuk aktif menyerang pemerintah Turki dan aset wisata dalam upaya untuk menghancurkan rezim Turki. Kelompok ini telah menargetkan Juga kepentingan Turki di Eropa Barat. Pada

tahun 1999, pemimpin PKK Abdullah Ocalan, ditangkap di Kenya dan diekstradisi ke Turki di mana saya telah menghadapi hukuman mati atas tuduhan terorisme. (Meskipun Dihukum, Turki Menghapuskan hukuman mati pada tahun 2002, dan hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup.) Penangkapan Ocalan serius melemah PKK. Setelah penangkapannya, Ocalan Menyatakan sebuah gencatan senjata sepihak dan Mengumumkan keinginannya untuk Membentuk "inisiatif perdamaian" dengan Turki pada isu-isu Kurdi. PKK Ditegaskan keinginan Ocalan, konon mengingkari sejarah kekerasan tersebut.

Pada tahun 2002, PKK berubah nama menjadi Kebebasan dan Demokrasi Kurdistan Kongres (Kadek), seharusnya Komitmen diri untuk kegiatan non-kekerasan. Pada tahun 2003, Kadek Mengumumkan sebuah "peta jalan" tiga-tahap untuk damai Menyelesaikan masalah otonomi Kurdi. Meskipun The gencatan senjata, kelompok terus pelatihan militer dan perencanaan dan Terus mengancam kekerasan. Pada tahun 2003, Kadek Mengumumkan Bahwa itu melarutkan dirinya sendiri dan menciptakan sebuah organisasi pan-Kurdi baru yang disebut Konferensi Rakyat Kurdistan (KHK) Itu akan mencari hak Kurdi melalui Negosiasi dengan Turki. Pejabat Turki telah diberhentikan ini bergerak sebagai taktik public relations. Ini Tetap tidak jelas apa hasil dari reorganisasi ini akan menjadi. Pada akhir 2003, Kadek yang Berusaha untuk insinyur lain politik facelift, mengubah nama kelompok Kongra-Gel (KGK) (Kongres Rakyat Kurdistan) dan mengacungkan "damai" niat, sementara Melanjutkan untuk melakukan serangan dan menolak perlucutan senjata.

Sejak Pasca invasi Irak, 2003-sekarang, Turki menuduh bahwa Massoud Barzani, presiden Pemerintah Daerah Kurdistan, dan pasukan koalisi pimpinan AS belum cukup untuk memerangi dengan PKK dan mengusir itu dari basisnya di

pegunungan Irak. [26] [27] dalam sebuah wawancara selama April 2010, Murat Karayilan, pemimpin sayap bersenjata PKK, mengaku organisasinya setelah diserang sekelompok tentara Amerika pada tahun 2004 di Irak Utara dan menewaskan sedikitnya salah satu dari mereka. [28]

Organisasi berasal dari tahun 1970-an dari kiri radikal dan menarik para pemimpinnya, anggota dari kelompok kiri lain yang sudah ada, terutama Dev-GENC Organisasi awalnya disajikan dirinya sebagai bagian dari revolusi komunis di seluruh dunia.. Maksud dan tujuan organisasi ini telah berkembang dari waktu ke waktu terhadap tujuan otonomi nasional, dan apa Ocalan Dubs "Confederalism Demokrat".

Selama tahun 1980-an gerakan termasuk dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok etnis lain, termasuk etnis Turki, yang mengikuti kiri radikal Organisasi awalnya bertujuan untuk membangun Kurdistan sepenuhnya independen meliputi tanah di Turki, Suriah, Irak dan Iran.

Pada tahun 1999, menyusul penangkapan Ocalan, organisasi mengumumkan "inisiatif perdamaian," dan berbicara lebih sering tentang hak-hak budaya atau bahasa. Namun, kelompok meninggalkan diri dikenakan gencatan senjata pada tahun 2004. Selain kegiatan diarahkan Turki, pada tanggal 17 Juli 2005, salah satu eksekutif kepala Hasan Ozen dibunuh di Austria. Hasan Ozen ingin meninggalkan organisasi, dan PKK secara luas dianggap bertanggung jawab. Di Diyarbakir, pada tanggal 6 Juli 2005, Hikmet Fidan, mantan pendiri cabang hukum Partai Rakyat Demokratik (HADEP), juga dibunuh. Hikmet Fidan telah mencoba untuk membentuk, partai non-kekerasan alternatif Kurdi politik yang disebut Partai Demokrasi Patriotik (PWD) dengan Osman Ocalan, saudara Abullah Ocalan.

Setidaknya 3 orang lain yang terlibat dengan PWD juga tewas. PKK secara luas dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan ini juga.

Gencatan senjata Dengan Pemerintah Turki berakhir pada musim semi tahun 2004 dan kekerasan berlanjut. Pada bulan April 2005 kelompok resmi Memutuskan untuk kembali ke nama aslinya. Pada bulan Agustus 2005, kelompok Mengumumkan gencatan senjata satu bulan dan Said Itu Mereka akan mengadakan pembicaraan damai tidak langsung dengan Pemerintah Turki. Pembicaraan Antara Partai Pekerja Kurdistan dan pemerintah Turki, namun, Telah gagal untuk kemajuan, kekerasan terkait dengan PKK Berlanjut di Turki, Khususnya di tenggara. Kelompok Diklaim Tanggung Jawab tiga penyerangan pasukan Turki di awal Maret 2006, Fosil ini diduga pembalasan atas kematian tujuh anggota PKK pada bulan Februari. Kelompok ini juga Diduga dalam beberapa pemboman kecil pada awal tahun 2006, memperlakukan termasuk pemboman di Ankara pada 8 Maret yang menewaskan tiga orang dan melukai delapan belas tahun.

C. Kembalinya Eskalasi antara PKK Suku Kurdi di Turki

Pada tanggal 15 Oktober 2007 pemerintah Turki juga telah mengajukan rancangan undang-undang kepada parlemen yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan operasi militer Turki ke wilayah Kurdi yang terletak di bagian Utara Irak, yang dapat dilakukan kapan saja guna menghancurkan basis-basis PKK di wilayah tersebut. Pada tanggal 17 Oktober 2007, dengan suara bulat akhirnya parlemen Turki mengesahkan rancangan Undang-undang dan memberikan izin kepada angkatan bersenjata Turki untuk melakukan serangan lintas batas guna

melumpuhkan basis-basis PKK di wilayah Irak Utara.³² Gerakan pemberontak Kurdi telah dianggap sebagai gerakan separatisme yang berbahaya bagi pemerintah Turki karena gerakan tersebut mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Turki. Pemberontakan Kurdi telah memasuki arena politik Turki dengan membentuk partai politik yang radikal dan mampu menghadapi tekanan Negara. Upaya pemerintah Turki dalam menangani gerakan separatis Kurdi telah dilakukan sejak awal pemberontakan yaitu tahun 1984 hingga saat ini konflik antara Turki dengan Kurdi masih terus berlangsung.³³

Kembalinya pemberontakan PKK suku kurdi dilihat dari terori perampasan pada masa terdahulu disebabkan adanya konflik masalah-masalah sosial seperti ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Masalah-masalah tersebut juga dapat berakar masalah budaya dan sosial. Bagi masyarakat Kurdi, proyek Ataturk untuk menyatukan seluruh kelompok etnis yang ada di Turki sebagai sebuah “bangsa Turki” merupakan sebuah penindasan budaya. Ini dapat dilihat dari larangan untuk menggunakan bahasa Kurdi dan perayaan Nevruz (Tahun Baru Persia). Ada juga permasalahan pembangunan di wilayah tenggara Turki yang lebih terbelakang dibandingkan wilayah lainnya seperti di wilayah Trakia (Turki Eropa) dan kota-kota Turki di pinggir laut Mediterania. Hal-hal tersebut menyebabkan rasa iri dan ketidakadilan oleh masyarakat Kurdi.

Pada bulan Desember 2009, pemerintah Republik Turki meluncurkan apa yang dinamakan sebagai “*the Kurdish Initiative*”. Inisiatif pemerintah Turki ini memiliki tujuan untuk memberikan keluasan hak berbahasa Kurdi yang lebih besar dan mengurangi jumlah pasukan pemerintah di wilayah Kurdi di tenggara Turki. Pada

³²ibid(<http://www.erasmuslim.com>)

³³Rubbin, Barry & Kemal Kirisci. (Ed). (2002). *Turkey in World Politics An Emerging Multiregional Power*. Istanbul: Bogazici University Press

bulan Juli 2010, pemimpin PKK, Murat Karayilan, mengatakan bahwa PKK bersedia untuk melucuti senjata mereka untuk hak politik dan budaya yang lebih luas kepada masyarakat Kurdi. Pemerintah Turki tidak memberi tanggapan terhadap pernyataan tersebut. Kemudian Pada bulan Juli 2011, setahun setelah tawaran untuk melucuti senjata dari Karayilan, gerilyawan PKK kembali melakukan serangan terhadap pasukan Turki di wilayah tenggara. Para gerilyawan tersebut, yang sejak jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003, menggunakan wilayah Irak utara untuk melakukan serangan-serangan lintas perbatasan terhadap Turki. Konflik bersenjata kembali pada wilayah Kurdi di Turki. Pemerintah Turki merespon dengan melakukan serangan-serangan lintas perbatasan dengan menggunakan pesawat-pesawat militer. Operasi-operasi pengeboman di Irak utara menyebabkan tidak hanya banyaknya gerilyawan Kurdi PKK tewas tetapi juga mengakibatkan korban sipil warga Irak. Hal tersebut mendapatkan kecaman yang keras dari pemerintahan Irak. Pada bulan September, serangan-serangan PKK tambah intensif dengan pengeboman di kota-kota Turki di tenggara. Salah satu kelompok pecahan (splinter group) PKK, TAK memasang bom pada sebuah mobil di daerah perumahan pejabat pemerintah di ibukota Turki, Ankara, yang menyebabkan empat orang tewas.³⁴

Pada bulan Oktober, Perdana Menteri Turki Erdogan mengumumkan pengiriman 22 batalyon pasukan Turki ke wilayah tenggara untuk melawan para gerilyawan separatis PKK. Turki juga melakukan kerjasama dengan Iran untuk melawan gerilyawan Kurdi yang beroperasi dari Irak dan menyerang posisi-posisi tentara Iran. Setelah bulan Oktober, konflik dengan PKK mulai meredam kembali.

³⁴Daily Hurriyet. *Turkish-Iraqi ties strained over claims of civilian deaths*, <<http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=turkish-iraqi-ties-strained-over-claims-of-civilian-deaths-2011-08-26>>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2012, jam 16:05.

Konflik PKK dan pemerintahan Turki yang telah berlangsung cukup lama sejak tahun 1982 tampak tidak akan ada hentinya. Walaupun pendiri organisasi tersebut telah tertangkap, kepemimpinan internal pecah sebagaimana terlihat dari adanya organisasi-organisasi baru, kebebasan yang lebih luas terhadap masyarakat Kurdi dan juga tawaran gencatan senjata dari PKK sendiri, konflik ini tampak seperti belum ada akhir. Pemerintahan Perdana Menteri Erdogan, setelah menghadapi peristiwa-peristiwa *Arab Spring* dan krisis ekonomi dunia serta krisis ekonomi Eropa yang berkepanjangan belum dapat memfokuskan diri terhadap *the Kurdish Question* ini. Konflik kelompok PKK suku kurdi akan terus berlanjut, hal ini dikarenakan PKK sendiri sudah pernah ada tawaran untuk melakukan gencatan senjata akan tetapi faktor utama dari terhambatnya proses perdamaian di Turki adalah terpecahnya kepemimpinan para nasionalis Kurdi.³⁵

³⁵Heper, Martin. 2007. *The State and Kurds in Turkey: The Question of Assimilation*. New York: Palgrave MacMillan